



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx,  
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, email :  
EMAIL, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MIMIKA,  
PROVINSI PAPUA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx/xxxx, tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Buton selama 1 (satu) minggu selanjutnya Penggugat



dengan Tergugat berangkat ke xxxxxxxx xxxxxx dan tinggal di rumah kost sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxx, 14 April 2014, umur 10 tahun;

Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti binatang dan anjing;

4.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian kepala Penggugat dan Penggugat merasa terancam jiwanya;

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 dimana Penggugat dan adik Tergugat bertengkar, namun Tergugat memihak kepada adik Tergugat dan menyalahkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi 1 (satu) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke Buton pada tahun 2023 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Penggugat mempertimbangkan nasihat dari Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Eko Yuniarto, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam mediasi telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai dan saling memaafkan;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim dan mediasi dengan Hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan, sebagaimana laporan hasil mediasi pada tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Eko Yuniarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK            | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp135.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)